



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Penituda No. 134 Semarang

Telp. Kp. Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301, Tl. ex : 22262 PK. WIL. SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENELINGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 2383 /103/I - 67

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Betelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Lemabaga Pendidikan Ma'arif - Magelang.

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 14 Agustus 1984 Nomor : 508/PC.MRF/VIII/1984 dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 23 Juni 1986 Nomor 168/103.8.4/A-86 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendiri-an Sekolah Swasta;

2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta; dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif

Alamat : Pondok KH. Siaj Wates Tengah Magelang
MAGELANG.

✓ Jenis/nama sekolah : SMA Ma'arif

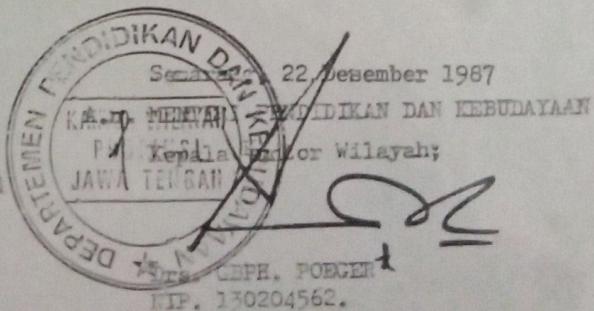
Alamat/lokasi sekolah : Kampung Barisan Kec. Cenimulyo
KAB. MAGELANG.

Mulai tahun ajaran 1986 / 1987 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1986 / 1987 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau me-nyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TENTUAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah.

✓ Bupati ~~A. Mulyadi~~ KDR Tk. II
MAGELANG.

✓ Kepala Kantor Depdikbud Kab. ~~T. Mulyadi~~
MAGELANG.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014233.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MA'ARIF CANDIMULYO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

| NAMA | NO. KTP/PASSPORT. | ORGAN PERKUMPULAN | JABATAN |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| SUKIR, S.PD | 3308080101610002 | PENGURUS | KETUA |
| HANIF ISMAIL HADZIQI | 3371020809830001 | PENGURUS | SEKERTARIS |
| JARIYANI | 3308157003660001 | PENGURUS | BENDAHARA |
| SUBADRUN, S.PD | 3308041607630001 | PENGAWAS | PENGAWAS |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2016



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0014233.AH.01.07.TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MA'ARIF CANDIMULYO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ENDANG UNTARI, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 172 Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh ENDANG UNTARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH MENENGAH ATAS MA'ARIF CANDIMULYO tanggal 29 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160129331011207 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH MENENGAH ATAS MA'ARIF CANDIMULYO;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MA'ARIF CANDIMULYO
Berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG, sesuai salinan Akta Nomor 172 Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ENDANG UNTARI, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2016